

Media Cetak	Suara Merdeka
Tanggal	24 Juni 2025
Wilayah	Kabupaten Temanggung



DPRD Minta Perbaikan SilpaRp99,5M *Suara Merdeka*

DPRD Minta Perbaikan Silpa Rp 99,5 M

TEMANGGUNG - Bupati Agus Setyawan menyoroti sejumlah temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah, salah satunya terkait proyek pembangunan yang kurang volume. "Ya, temuannya seperti itu. Harapannya ke depan bisa kita perbaiki agar tidak terulang, apalagi kita masih mempertahankan predikat WTP secara bersih," kata Bupati Agus.

Selain menanggapi temuan BPK, bupati juga menyoroti besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang menjadi pekerjaan rumah bersama. "Silpa juga menjadi perhatian. Semoga pelaksanaan di tahun 2025 bisa lebih tepat waktu agar Silpa tidak terlalu besar," tambahnya.

Ketua DPRD Yudianto menyatakan seluruh fraksi telah menerima dan menyetujui laporan pertanggungjawaban RKPD APBD 2024. Namun, ia menegaskan tetap ada sejumlah catatan penting. "Jawaban dari bupati sudah cukup kooperatif, terutama terkait isu BUMD, infrastruktur, dan percepatan anggaran. Silpa sebesar Rp99,5 miliar menjadi perhatian kita bersama. Harapannya di tahun 2025 anggaran bisa lebih optimal diserap," ujar Yudianto.

Pengawasan

Fraksi PDI Perjuangan menyoroti perlunya percepatan penyerapan anggaran agar program tidak menumpuk di akhir tahun. Mereka juga mendorong agar belanja daerah lebih berkualitas dan tepat sasaran, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. "Peningkatan fungsi pengawasan internal dan eksternal perlu diperkuat agar pengelolaan APBD lebih efisien. Perencanaan juga harus ditingkatkan untuk menghindari mismatch antara program dan kebutuhan," ucap juru bicara fraksi. Fraksi ini juga menyinggung soal rendahnya investasi akibat proses perizinan yang masih dianggap rumit.

Fraksi PKB memberikan catatan khusus pada pengelolaan aset daerah, seperti pasar daerah dan Plaza Temanggung. Mereka meminta agar penyelesaian piutang pedagang dikaji kembali dan aset dimanfaatkan secara lebih produktif. "Kami juga menyoroti kondisi enam rumah susun (rusunawa) yang rusak parah. Selain itu, retribusi dari beberapa perangkat daerah perlu dievaluasi. Catatan BPK harus ditindaklanjuti dengan langkah konkret agar kesalahan tidak terulang," jelas perwakilan Fraksi PKB. (ric-26)